

Pembubaran Parlemen Berdampak Tertundanya Pembentukan GOPAC

Selasa, 13/05/2014 - 07:23

JAKARTA, (PRLM).- Pembubaran Parlemen Thailand berdampak pada telah terjadinya penundaan Pembentukan Gugus Tugas Nasional Anti-Korupsi atau GOPAC (Global Organization Parliamentarians Against Corruption) Thailand.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPR Pramono Anung dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2013-2014 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/5/2014).

Selaku Presiden SEAPAC (Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption), Pramono mengatakan DPR telah menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi politik yang terjadi di Thailand.

Melihat pada dinamika yang terjadi, DPR berharap Thailand segera menemukan titik cerah dan dapat membentuk parlemen yang baru, dalam upaya bersama melakukan pemberantasan korupsi di kawasan dalam kerangka SEAPAC.

Pramono Anung mengatakan, DPR telah mengirimkan delegasi untuk menghadiri The Second World e-Parliament Conference yang dilaksanakan di Majelis Nasional Republik Korea, Seoul pada tanggal 8-10 Mei yang lalu.

Melalui konferensi yang bertema "Lessons Learned and Future Horizon" ini, Dewan dapat saling bertukar pengalaman dan membangun kerjasama antar parlemen dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

DPR juga telah mengirim Delegasi ke Preparatory Meeting dan ASEAN Leaders Meeting with ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Representatives pada tanggal 11 Mei 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, yang dilaksanakan di sela-sela KTT ASEAN ke 24.

Di bagian lain, Pramono mengatakan, DPR akan menjadi tuan rumah Sidang APASstanding Committee on Economic and Sustainable Development pada tanggal 2-5 Juni 2014 di Jakarta, yang mengangkat tema "Alleviating Poverty Through the Implementation of Sustainable Development".

Sidang akan membahas permasalahan yang menjadi perhatian bersama dari negara-negara anggota APA terkait isu-isu ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, serta pembahasan usulan empat draft resolusi dari Sekretariat APA.

Sidang ini memiliki arti penting bagi DPR, karena menunjukkan peran Indonesia sebagai salah satu pemimpin Asia dalam bidang ekonomi. (Sjafri Aii/A-89)***